



## **Bela Negara dalam Krisis Kepercayaan Publik: Tantangan Membangun Solidaritas Sosial di Era Pemerintahan Baru**

### ***Defending the Nation Amid Public Trust Crisis: Challenges in Building Social Solidarity in the New Government Era***

**Gusti Muhammad Fiqry<sup>1\*</sup>, Salma Elcanza Asfuri<sup>2</sup>, Anindhito Hafizh Akyel Nugroho<sup>3</sup>, Bima Henrisyah Putra<sup>4</sup>, Sultan Syarief Rahmansyah<sup>5</sup>, Ria Kusuma Puspita<sup>6</sup>**

Universitas Gadjah Mada

Email : [gustimuhammadfiqry@mail.ugm.ac.id](mailto:gustimuhammadfiqry@mail.ugm.ac.id)<sup>1\*</sup>, [salmaelcanzaasfuri@mail.ugm.ac.id](mailto:salmaelcanzaasfuri@mail.ugm.ac.id)<sup>2</sup>, [aninditohafizhakyelanugroho@mail.ugm.ac.id](mailto:aninditohafizhakyelanugroho@mail.ugm.ac.id)<sup>3</sup>, [bimahenrisyahputra@mail.ugm.ac.id](mailto:bimahenrisyahputra@mail.ugm.ac.id)<sup>4</sup>, [sultansyariefrahmansyah@mail.ugm.ac.id](mailto:sultansyariefrahmansyah@mail.ugm.ac.id)<sup>5</sup>, [riakusumapuspita@mail.ugm.ac.id](mailto:riakusumapuspita@mail.ugm.ac.id)<sup>6</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 07-06-2025

Revised : 09-06-2025

Accepted : 11-06-2025

Published : 14-06-2025

#### **Abstract**

*The decline in public trust in state institutions after the 2024 Election has become a central issue that threatens the sustainability of democracy and social integration in Indonesia. This study aims to examine how the concept of national defense and strengthening social solidarity can contribute to responding to the crisis of public trust. This study uses a literature review method with a qualitative descriptive approach to scientific journals, survey reports, and relevant policy documents. The results of the study show that national defense is not only limited to loyalty to state symbols, but also includes the active role of citizens in maintaining the integrity of democracy through political involvement and the formation of national character. Meanwhile, social solidarity is seen as a prerequisite for community resilience in facing political polarization that threatens national cohesion. The combination of the two, if carried out sustainably, will strengthen the integrity of state institutions while building the foundation of an inclusive and conflict-resistant society. Thus, the strategy of national defense and strengthening social solidarity is not just a slogan, but a real need in strengthening public trust in the era of the new government.*

**Keywords:** *Civic defense, Public trust, New government*

#### **Abstrak**

Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara setelah Pemilu 2024 menjadi isu sentral yang mengancam keberlangsungan demokrasi dan integrasi sosial di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep bela negara dan penguatan solidaritas sosial dapat berkontribusi dalam merespons krisis kepercayaan publik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap jurnal ilmiah, laporan survei, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya sebatas loyalitas terhadap simbol negara, tetapi juga mencakup peran aktif warga dalam menjaga keutuhan demokrasi melalui keterlibatan politik dan pembentukan karakter kebangsaan. Sementara itu, solidaritas sosial dipandang sebagai prasyarat bagi ketahanan masyarakat dalam menghadapi polarisasi politik yang mengancam kohesi nasional. Kombinasi keduanya, bila dijalankan secara berkelanjutan, akan memperkuat integritas institusi negara sekaligus membangun fondasi masyarakat yang inklusif dan tahan terhadap konflik. Dengan demikian, strategi bela negara dan penguatan solidaritas sosial bukan sekadar slogan, tetapi menjadi kebutuhan nyata dalam memperkuat kepercayaan publik pada era pemerintahan baru.

**Kata Kunci:** *Bela negara, Kepercayaan publik, Pemerintahan baru*



## PENDAHULUAN

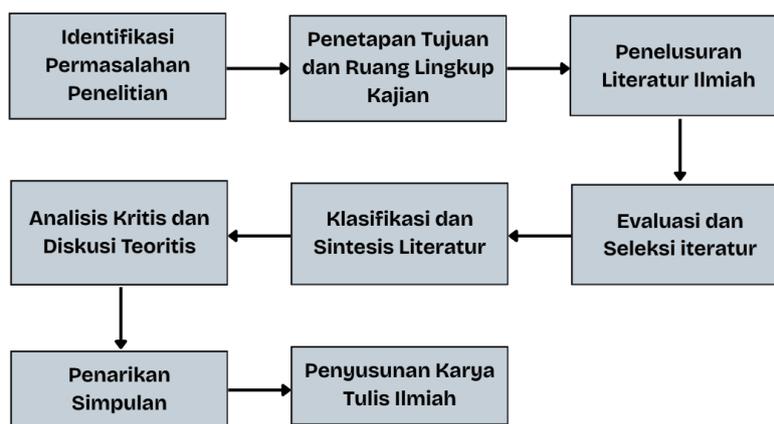
Pemilu 2024 yang berlangsung di tengah semangat demokrasi justru menyisakan perasaan skeptis dalam masyarakat. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren penurunan drastis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya lembaga politik seperti DPR dan partai politik (Muhtadi, 2024). Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal akan potensi krisis kepercayaan yang dapat melemahkan legitimasi negara. Dalam konteks ini, upaya membangun kembali kepercayaan publik menjadi urgensi nasional yang tidak bisa diabaikan.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan menguatnya polarisasi politik dan ketegangan sosial pasca pemilu. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi disintegrasi sosial yang membahayakan stabilitas negara (Rianadiwa et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menyentuh aspek nilai dan karakter kebangsaan.

Dalam konteks inilah konsep bela negara menjadi relevan untuk direaktualisasikan. Bela negara tidak lagi dipahami semata sebagai bentuk pertahanan militer, tetapi sebagai tanggung jawab warga dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara (Siregar et al., 2022). Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam bela negara perlu disinergikan dengan upaya membangun solidaritas sosial sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Melalui pendidikan politik, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta penegakan hukum yang adil dan transparan, solidaritas sosial dapat ditumbuhkan secara konstruktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep bela negara dan solidaritas sosial dapat menjadi landasan strategis dalam menghadapi krisis kepercayaan publik, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kohesi sosial di era pemerintahan baru.

## METODE PENELITIAN



**Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (literature review). Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis berbagai literatur ilmiah yang relevan guna mengkaji peran bela negara dan solidaritas sosial dalam merespons krisis kepercayaan publik pasca Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi



permasalahan utama, yaitu turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menguatnya polarisasi politik, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: bagaimana kontribusi bela negara dan solidaritas sosial dalam membangun kembali kepercayaan publik dan menjaga kohesi nasional di era pemerintahan baru. Selanjutnya, ditetapkan tujuan penelitian serta ruang lingkup kajian yang berfokus pada konteks Indonesia kontemporer, khususnya pada masa transisi pasca-pemilu.

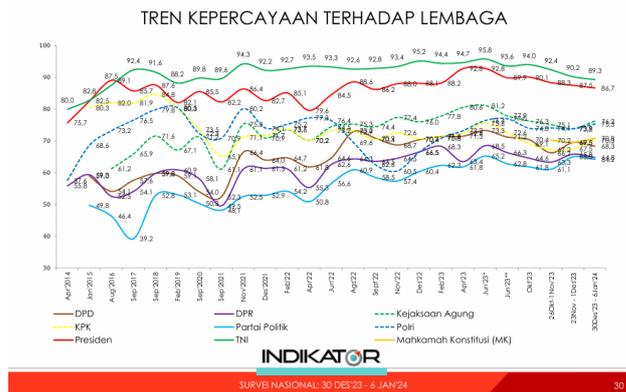
Fokus utama diarahkan pada tiga variabel kunci, yaitu krisis kepercayaan publik, aktualisasi konsep bela negara, dan strategi memperkuat solidaritas sosial. Untuk itu, penelusuran literatur ilmiah dilakukan dengan mengakses berbagai sumber akademik dari basis data seperti Garuda, Neliti, Google Scholar, SINTA, serta jurnal universitas terakreditasi. Kriteria seleksi meliputi kesesuaian tema, kredibilitas sumber (peer-reviewed), dan periode publikasi maksimal sepuluh tahun terakhir. Literatur yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disintesis berdasarkan tema substansial yang mencakup pemetaan permasalahan sosial-politik, pendekatan ideologis bela negara, serta dinamika sosial masyarakat pasca pemilu. Setelah proses klasifikasi, dilakukan analisis kritis terhadap isi literatur yang terpilih.

Penulis membandingkan berbagai perspektif dan temuan, kemudian mengintegrasikannya ke dalam diskusi teoritis yang mendalam untuk memperkuat argumentasi ilmiah dalam membahas hubungan antara bela negara, solidaritas sosial, dan kepercayaan publik. Langkah selanjutnya adalah menarik simpulan dari hasil sintesis dan analisis tersebut, yang kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang relevan dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini. Akhirnya, seluruh proses dan temuan dari kajian pustaka ini disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan format dan ketentuan penulisan jurnal JIIIC (Jurnal Intelek Insan Cendekia). Seluruh tahapan penelitian ini juga divisualisasikan dalam bentuk bagan alur (Gambar 1) untuk menunjukkan proses berpikir dan logika metodologis yang digunakan dalam kajian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Krisis Kepercayaan Publik Pasca-Pemilu**

Setelah pelaksanaan Pemilu 2024, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup mencolok. Kondisi ini diperparah oleh polarisasi politik yang semakin tajam, di mana perbedaan pilihan politik justru menimbulkan sekat dan ketegangan antar kelompok warga (Rianadiwa et al., 2024). Survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia (**Gambar 2**) mencatat bahwa meskipun TNI dan Presiden masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik (89,3% dan 86,7%), angka kepercayaan terhadap lembaga politik seperti DPR dan partai politik jauh lebih rendah, yakni hanya 64,8% dan 64,2% (Muhtadi, 2024).



Gambar 2. Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara di Indonesia (30 Desember 2023 – 6 Januari 2024). Sumber: Indikator

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari maraknya isu korupsi serta ketidakadilan dalam penegakan hukum yang mencoreng legitimasi lembaga negara. Ketidakpercayaan yang terus berkembang ini bukan hanya menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat, karena rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap jalannya demokrasi (Rianadiwa et al., 2024). Sejumlah pengamat menyampaikan kekhawatiran bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kohesi sosial dapat terganggu dan stabilitas politik jangka panjang pun menjadi terancam (Gilang Putra & Kayus Kayouwan Lewoleba, 2024). Dalam situasi seperti ini, upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan yang demokratis, inklusif, dan mampu menyentuh langsung aspirasi warga.

### Reaktualisasi Bela Negara dalam Konteks Demokrasi

Selama ini, konsep bela negara dipahami sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab setiap warga negara yang didasari oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa, serta keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 (Siregar et al., 2022). Namun, di tengah perubahan zaman dan dinamika politik yang kian kompleks, konsep ini perlu direaktualisasi agar tetap relevan. Hari ini, tantangan bangsa tidak hanya datang dari ancaman luar, tetapi juga dari dalam seperti korupsi, radikalisme, penyebaran hoaks, dan bahkan krisis kepercayaan itu sendiri (Rizki et al., 2022). Oleh karena itu, bela negara harus dimaknai lebih luas, tidak hanya sekadar membela negara secara fisik, melainkan juga menjadi warga yang peduli, kritis, dan berkontribusi aktif dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

Semangat bela negara hanya akan bermakna jika terintegrasi dengan arah pembangunan nasional dan penguatan demokrasi (Mulyadi, Kayus Leoleba K, Satino, Yuliana Yuli W, 2017). Nilai-nilai seperti kedisiplinan, gotong royong, dan loyalitas kepada negara harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang adil dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, bela negara tidak lagi menjadi slogan belaka, tetapi menjadi praktik hidup sehari-hari yang memperkuat ikatan antara warga dan negara. Pada akhirnya, reaktualisasi bela negara juga diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat luntur.

### Strategi Membangun Solidaritas Sosial

Di tengah menguatnya polarisasi dan menurunnya kepercayaan publik, memperkuat solidaritas sosial menjadi agenda yang sangat penting. Ada empat strategi utama yang dapat



dilakukan. Pertama adalah memperkuat pendidikan politik dan literasi demokrasi. Pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek formal sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk karakter warga yang toleran, terbuka, dan aktif secara politik, merupakan fondasi penting dalam menjaga keberagaman (Mulyadi, Kayus Leoleba K, Satino, Yuliana Yuli W, 2017). Seperti yang ditunjukkan dalam riset (Amanda et al., 2025), pendidikan politik yang inklusif mampu meningkatkan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, serta mendorong terbentuknya demokrasi yang lebih sehat dan adil.

Kedua, nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong perlu dihidupkan kembali melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung prinsip-prinsip dasar solidaritas dan keadilan sosial, yang sangat relevan untuk menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda (Rianadiwa et al., 2024). Di tingkat lokal, misalnya, program bela negara dapat dirancang dalam bentuk kegiatan sosial lintas kelompok seperti kerja bakti, dialog warga, atau proyek bersama yang menumbuhkan rasa kebersamaan (Sunara Akbar et al., 2024). Penelitian oleh Siregar dkk. pun menegaskan bahwa melalui pendidikan bela negara, rasa solidaritas dapat dibangkitkan kembali dan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Bila nilai-nilai ini tertanam dalam kehidupan sehari-hari, polarisasi politik pun dapat berkurang secara alami (Rianadiwa et al., 2024).

Ketiga, membuka ruang dialog dan rekonsiliasi antar kelompok menjadi langkah strategis untuk meredam ketegangan pasca pemilu. Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu aktif menciptakan ruang diskusi yang aman, terbuka, dan inklusif. Tradisi seperti halalbihalal maupun forum lintas agama dan komunitas bisa dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi dan menyamakan persepsi (Rianadiwa et al., 2024). Komunikasi yang terbuka ini diharapkan bisa mengurangi prasangka dan memupuk kembali rasa saling percaya di antara kelompok yang sebelumnya sempat terpecah akibat kontestasi politik.

Keempat, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Reformasi dalam lembaga penegak hukum serta penguatan institusi pengawas seperti Bawaslu dan DKPP menjadi hal yang mendesak (Gilang Putra & Kayus Kayouwan Lewoleba, 2024). Bila masyarakat melihat adanya keadilan dalam penyelesaian pelanggaran pemilu maupun kasus korupsi, maka mereka akan lebih mudah percaya bahwa sistem demokrasi masih bisa diandalkan. Gabungan dari keempat strategi ini—pendidikan politik, penguatan nilai kebangsaan, ruang dialog, dan hukum yang adil—akan membentuk landasan yang kokoh bagi solidaritas sosial pasca pemilu.

### **Sinergi Konseptual Bela Negara dan Solidaritas Sosial**

Pada dasarnya, bela negara dan solidaritas sosial merupakan dua gagasan yang saling menguatkan. Nilai-nilai utama dalam bela negara, seperti cinta tanah air dan rela berkorban, secara alami beririsan dengan semangat empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Individu yang memiliki kesadaran bela negara biasanya juga memiliki dorongan untuk melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Dalam situasi krisis seperti saat ini, di mana stabilitas sosial bisa goyah akibat ketidakpercayaan, peran bela negara menjadi sangat krusial (Siregar et al., 2022).



Penelitian menunjukkan bahwa tanpa fondasi kesadaran bela negara, masyarakat lebih rentan terjebak dalam sikap reaktif atau bahkan destruktif. Sebaliknya, jika nilai-nilai kebangsaan ditanamkan dengan baik, masyarakat akan lebih tahan terhadap provokasi dan cenderung memilih jalan dialog dan gotong royong untuk menyelesaikan persoalan (Siregar et al., 2022). Namun demikian, semangat bela negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Jika rakyat diminta untuk berkorban sementara pejabat publik tidak memberi contoh yang baik, maka ajakan bela negara hanya akan dipandang sinis.

Oleh sebab itu, sinergi antara bela negara dan solidaritas sosial harus dibangun secara konkret dan berkelanjutan. Program-program bela negara harus dikaitkan langsung dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, serta pendidikan antikorupsi yang nyata. Kombinasi ini tidak hanya memperkuat rasa kebangsaan, tetapi juga menciptakan *social capital* yang dibutuhkan untuk menjaga integritas lembaga dan memperkuat konsolidasi demokrasi (Siregar et al., 2022). Dalam jangka panjang, keselarasan antara semangat bela negara dan kehidupan sosial yang inklusif akan membawa Indonesia ke arah yang lebih solid, tangguh, dan maju secara bersama-sama.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis kepercayaan publik pasca Pemilu 2024 tidak dapat diatasi hanya dengan langkah-langkah administratif, melainkan membutuhkan pendekatan ideologis dan kultural yang lebih mendalam. Konsep bela negara yang diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif warga, pendidikan kebangsaan, serta penguatan etika publik terbukti relevan dalam membangun kembali legitimasi negara. Sementara itu, solidaritas sosial menjadi kekuatan sipil yang mampu menahan laju polarisasi dan membangun kembali jembatan kepercayaan antar kelompok warga.

Dua strategi ini, bila dijalankan secara bersamaan dan berkesinambungan, akan memperkuat fondasi sosial-politik Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tantangan internal. Pemerintah perlu menjadikan bela negara bukan sekadar program simbolik, tetapi sebagai kerangka kerja dalam menyusun kebijakan inklusif. Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus diberdayakan melalui ruang-ruang dialog dan pendidikan politik yang sehat. Dengan begitu, krisis kepercayaan dapat diubah menjadi momentum pembaruan demokrasi yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Zulisih Maryani, S.S., M.A. yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan kajian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah berdiskusi dan berbagi referensi yang relevan. Tidak lupa, apresiasi ditujukan kepada lembaga-lembaga yang telah menyediakan data dan literatur akademik yang menjadi dasar kajian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wacana kebangsaan dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

Amanda, T., Novriza, H., & Dhewantoro, S. (2025). *Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural*. 5, 7–14.



- Gilang Putra, & Kayus Kayouwan Lewoleba. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Muhtadi, B. (2024). *Rilis-Indikator-23-Januari-2024*. 8, 1–60. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>
- Mulyadi, Kayus Leoleba K, Satino, Yuliana Yuli W, S. (2017). Bela negara, politik dan demokrasi di indonesia. *Media Informasi Kementraian Pertahanan WIRA, Edidi Khus*, 29–34.
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Triadi Salam, V., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 169–179.
- Rizki, A. H., Riswanda, M. N., & Andiar, A. (2022). *43-Article Text-184-1-10-20221129*. 2022(Senada), 51–55.
- Siregar, S. K., Rudyanto, R., Yulianto, B. A., & ... (2022). Pelaksanaan Bela Negara Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 552–559.
- Sunara Akbar, R., Bayu Krisna Aji, M., Zaqi Zhilal, M. F., Aurora, D., Ferry Akbar, L. M., Khusnul Khotimah, A., Rozansyah, D. Z., & Ragachdo, F. (2024). Urgensi Bela Negara Untuk Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Dan Peranannya Dalam Intergrasi Nasional. *Journal on Education*, 6(4), 18552–18563. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5815>